

## Fungsi dan Peranan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat yang Multi Budaya dan Multi Etnis

Didik Darmadi \*<sup>1</sup>  
Ibnu Atta Rohman<sup>2</sup>  
Nurul Mubin <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Sains Al-Qur'an

\*e-mail : [Didikdrmdi815@gmail.com](mailto:Didikdrmdi815@gmail.com), [ibnuatarohman@gmail.com](mailto:ibnuatarohman@gmail.com), [mubin@unsiq.ac.id](mailto:mubin@unsiq.ac.id)

### Abstrak

*Hukum memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, khususnya dalam konteks masyarakat yang multi budaya dan multi etnis. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum berfungsi sebagai alat pengatur dan pemersatu dalam keberagaman budaya dan etnis, serta peranannya dalam menciptakan keadilan dan harmoni sosial. Dengan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, hasil kajian menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen integrasi dan perlindungan hak asasi manusia di tengah perbedaan budaya dan etnis.*

**Kata Kunci :** Hukum, Masyarakat, Multi Budaya

### Abstract

*Law has a very important function and role in regulating the life of society, especially in the context of a multicultural and multi-ethnic society. This article aims to examine how law functions as a tool for regulation and unification in cultural and ethnic diversity, as well as its role in creating social justice and harmony. With a qualitative approach based on literature studies, the results of the study show that law not only functions as a tool for social control, but also as an instrument for integration and protection of human rights amidst cultural and ethnic differences.*

**Keywords:** Law, Society, Multicultural

### PENDAHULUAN

Masyarakat modern sering kali ditandai oleh keragaman budaya dan etnis yang tinggi. Indonesia, misalnya, dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya dan etnis yang luar biasa. Terdapat lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ratusan bahasa daerah yang hidup berdampingan dalam satu negara. Keberagaman ini mencerminkan potensi besar dalam menciptakan kekayaan budaya, namun juga membawa risiko konflik yang timbul dari perbedaan nilai, adat, dan kepentingan. Misalnya, konflik terkait dengan perebutan sumber daya alam antara masyarakat adat dan perusahaan tambang sering kali mencerminkan benturan antara hukum adat dan hukum nasional. Konflik semacam ini dapat memicu ketegangan sosial jika tidak dikelola dengan baik.

Dalam hal ini, hukum hadir sebagai mekanisme penting yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu tetapi juga menjembatani perbedaan. Ketika hukum adat yang berlaku di suatu wilayah bertentangan dengan regulasi nasional, peran hukum adalah menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak. Sebagai contoh, dalam kasus reklamasi lahan atau perizinan tambang, hukum menyediakan kerangka kerja untuk mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai, sehingga hak-hak masyarakat adat tetap dihormati tanpa mengabaikan kepentingan pembangunan nasional.

Pemahaman mendalam tentang peran hukum dalam masyarakat multi budaya dan multi etnis mencakup aspek filosofis, sosiologis, dan normatif. Secara filosofis, hukum mencerminkan nilai-nilai keadilan universal yang harus dihormati oleh semua individu tanpa memandang latar belakang budaya. Secara sosiologis, hukum adalah instrumen yang merespons dinamika sosial dalam masyarakat yang kompleks. Sedangkan secara normatif, hukum berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan keteraturan dan melindungi hak asasi manusia. Oleh karena itu,

peranan hukum tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menciptakan harmoni sosial dan keadilan di tengah keberagaman.

Artikel ini membahas fungsi dan peranan hukum dalam konteks masyarakat yang multi budaya dan multi etnis, dengan fokus pada aspek keadilan, harmoni sosial, dan perlindungan hak asasi manusia.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber, termasuk jurnal akademik, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi fungsi dan peranan hukum dalam masyarakat multi budaya dan multi etnis, serta mengevaluasi efektivitas hukum dalam menciptakan keadilan dan harmoni sosial.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki beberapa fungsi utama dalam masyarakat yang multi budaya dan multi etnis.

### **1. Hukum Sebagai alat pengendalian sosial**

Pengendalian sosial adalah proses di mana norma, aturan, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat diterapkan untuk mengatur perilaku individu dan kelompok. Tujuan utama pengendalian sosial adalah untuk menjaga keteraturan sosial, mencegah perilaku menyimpang, dan mengurangi konflik di antara anggota masyarakat.

Hukum menetapkan norma-norma yang dapat diterima oleh semua pihak, sehingga membantu menciptakan keteraturan di tengah keberagaman. Pengendalian sosial melalui hukum bertujuan untuk mencegah perilaku yang menyimpang dan meminimalkan potensi konflik antarindividu maupun antarkelompok. Dengan adanya sanksi hukum yang jelas, masyarakat didorong untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan demi menjaga harmoni sosial. Dalam masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok budaya dan etnis, hukum memberikan panduan yang jelas terkait perilaku yang dapat diterima. Sebagai contoh, hukum terkait pengelolaan sumber daya alam memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara masyarakat adat dan pihak-pihak lain seperti perusahaan tambang. Dengan menyediakan aturan main yang transparan, hukum membantu meminimalkan potensi konflik dan menciptakan stabilitas sosial.

### **2. Hukum juga berfungsi sebagai pemersatu dan instrumen integrasi**

Pemersatu adalah suatu konsep yang merujuk pada hal-hal, nilai-nilai, atau mekanisme yang dapat menghubungkan berbagai kelompok, individu, atau elemen dalam masyarakat yang beragam. Dalam konteks masyarakat multi budaya dan multi etnis, pemersatu berfungsi untuk menciptakan rasa kesatuan dan solidaritas di antara kelompok yang berbeda, sehingga mengurangi potensi konflik dan meningkatkan kerjasama.

Instrumen Integrasi adalah alat atau mekanisme yang digunakan untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat ke dalam satu kesatuan yang harmonis. Ini mencakup kebijakan, hukum, dan program-program yang dirancang untuk mengatasi perbedaan dan menciptakan kesetaraan di antara kelompok-kelompok yang berbeda.

Maksud dari instrumen integrasi adalah peran hukum dalam menyatukan berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang budaya dan etnis yang berbeda ke dalam kerangka sosial yang lebih besar. Hukum menciptakan landasan kesetaraan dan keadilan yang memungkinkan semua kelompok untuk merasa diakui dan dihormati dalam tatanan masyarakat. Undang-Undang Dasar 1945, misalnya, menggariskan prinsip kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Dalam konteks ini, hukum menjadi jembatan yang menjalin rasa saling percaya antar kelompok. Kebijakan afirmatif dalam pendidikan dan lapangan kerja juga merupakan contoh bagaimana hukum dapat memperkuat integrasi sosial dengan memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok-kelompok minoritas. Undang-Undang Dasar 1945, misalnya, menggariskan prinsip kesetaraan bagi semua warga negara tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Dalam konteks ini, hukum menjadi jembatan yang menjalin rasa saling percaya antar kelompok. Kebijakan afirmatif dalam

pendidikan dan lapangan kerja juga merupakan contoh bagaimana hukum dapat memperkuat integrasi sosial dengan memberikan kesempatan yang setara bagi kelompok-kelompok minoritas.

### 3. Hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak asasi manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu secara inheren, tanpa memandang ras, jenis kelamin, agama, kebangsaan, atau status sosial. Hak-hak ini dianggap sebagai hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut, karena berkaitan langsung dengan martabat dan nilai kemanusiaan.

Hak asasi manusia mencakup hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu tanpa memandang latar belakang budaya, agama, atau etnis. Hukum bertindak sebagai penjaga agar hak-hak ini tidak dilanggar, baik oleh individu lain, kelompok masyarakat, maupun negara. Kelompok minoritas sering kali menjadi target diskriminasi atau marginalisasi dalam masyarakat yang multi budaya. Dalam hal ini, hukum hadir untuk memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan yang menjamin setiap individu dapat mempertahankan identitas budaya, bahasa, dan tradisinya tanpa rasa takut. Perlindungan ini juga mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan hak atas perlakuan yang setara. Selain penting bagi individu, perlindungan hak asasi manusia melalui hukum juga berdampak pada komunitas secara keseluruhan, karena melibatkan hak kolektif mereka untuk melestarikan warisan budaya dan identitas bersama.

### 4. Hukum menyediakan mekanisme formal untuk menyelesaikan konflik

Dalam konteks sosial hukum menyediakan mekanisme formal untuk menyelesaikan konflik baik melalui mediasi, arbitrase, maupun proses pengadilan. Mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan secara damai dengan bantuan mediator yang netral, sehingga konflik dapat diselesaikan tanpa harus melalui proses hukum yang panjang. Arbitrase, di sisi lain, menyediakan alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih menunjuk arbiter untuk memberikan putusan yang mengikat. Proses pengadilan, sebagai jalan terakhir, memastikan bahwa konflik yang tidak dapat diselesaikan secara informal mendapatkan keputusan berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan adanya mekanisme ini, hukum tidak hanya mencegah eskalasi konflik tetapi juga menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Selain itu, kampanye kesadaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman. Hal ini mendukung terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan menghormati pluralisme.

## KESIMPULAN

Hukum memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan masyarakat yang multi budaya dan multi etnis. Selain berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, hukum juga menjadi instrumen penting dalam integrasi dan perlindungan hak asasi manusia. Agar hukum dapat berfungsi secara optimal, diperlukan pendekatan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang beragam. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan aturan, tetapi juga menjadi pilar keadilan dan harmoni sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.  
Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.  
Asshiddiqie, Jimly. (2009). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.  
Susan B. Gluck. (2010). *Cultural Diversity and the Law: A Comparative Overview*. New York: Routledge.  
Amnesty International. (2021). *Human Rights in the Multicultural Society*. London: Amnesty International Publications.